

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Otonomi Khusus dan Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2010-2022 dalam rangka mengetahui Latar Belakang dilakukannya pemekaran daerah tersebut. Berdasarkan hasil dari pembahasan yang dilakukan pada BAB IV, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dana Otonomi Khusus dan Dana Alokasi Umum secara simultan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua Pegunungan. Hal tersebut menjelaskan bahwa Dana Otonomi Khusus dan Dana Alokasi Umum secara bersama-sama mampu berkontribusi secara nyata dalam menaikkan tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan.
2. Dana Otonomi Khusus berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Pegunungan.
3. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Pegunungan, serta menjadi dana transfer paling berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di 8 Kabupaten Provinsi Papua Pegunungan
4. Pada sistem desentralisasi dikatakan bahwa delegasi wewenang dapat membuat masyarakat lebih dilibatkan dalam pembuatan kebijakan dan aspirasinya didengar, tetapi bagaimana hal tersebut bisa terwujud jika lingkup sebuah wilayah masih terlalu luas sampai tidak semua kepentingan masyarakat bisa tersampaikan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, lebih lanjut dapat diketahui koefisien determinasi (proporsi pengaruh) kedua variabel independen Dana Otonomi Khusus dan Dana Alokasi Umum terhadap variabel terikat Pertumbuhan Ekonomi sebesar 44%. Selebihnya 56% dijelaskan oleh faktor lain di luar kedua variabel bebas tersebut. Adapun saran-saran penelitian ini mencakup Saran Akademik dan Saran Praktik, sebagai berikut:

### **1. Saran Akademik**

Terdapat dua saran akademik yang dikemukakan oleh peneliti. Saran-saran tersebut mencakup aspek yang dapat menjadi perhatian peneliti lain untuk mengangkat topik penelitian sejenis. Berikut ini penjelasannya:

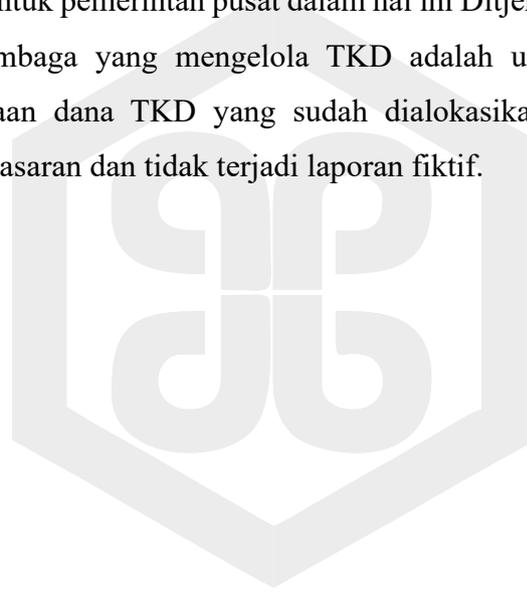
- a. Berdasarkan serangkaian hasil uji di atas, di dapatkan bahwa kedua variabel independen hanya menjelaskan variabel dependen sebesar 44%, peneliti lain yang tertarik untuk mengangkat topik ini bisa meneliti jenis TKD lain seperti Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non-Fisik, atau Dana Tambahan Infrastruktur yang memang diperuntukkan untuk DOB.
- b. Lokus penelitian yang ditetapkan adalah pemekaran Provinsi Papua Pegunungan, peneliti menyarankan penetapan lokus berbeda seperti pemekaran Provinsi Papua Selatan atau Papua Tengah.
- c. Periode waktu penelitian yang ditetapkan adalah Tahun 2010-2022, waktu sebelum dilakukannya pemekaran daerah. Dalam hal ini peneliti menyarankan untuk menganalisis dampak pemekaran daerah itu sendiri terhadap pertumbuhan ekonomi.
- d. Menggunakan data realisasi anggaran dengan detail penggunaan yang lebih merinci, sehingga penelitian selanjutnya dapat mengetahui penggunaan dana berdasarkan sektor-sektor tertentu.

### **2. Saran Praktik**

Terdapat saran yang bisa peneliti berikan kepada Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dalam mengelola Alokasi TKD yaitu menggunakan alokasi dana yang ada untuk pembangunan yang memiliki output nyata terhadap masyarakat, program

yang bersangkutan langsung dengan masyarakat, bukan hanya infrastruktur yang mendukung jalannya pemerintahan seperti Kantor Gubernur, atau penggunaan berlebihan pada belanja pegawai dan belanja pemerintah daerah.

Kemudian saran untuk pemerintah pusat dalam hal ini Ditjen PK, Kementerian Keuangan sebagai lembaga yang mengelola TKD adalah untuk memperketat pengawasan penggunaan dana TKD yang sudah dialokasikan ke daerah agar penggunaannya tepat sasaran dan tidak terjadi laporan fiktif.



POLITEKNIK  
STIA LAN  
JAKARTA

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Akhmad. (2005). *Amber dan komin: studi perubahan ekonomi di papua*. Yogyakarta: Bigraf Publishing.
- Arsyad, L. (1999). *Pengantar perencanaan dan pembangunan ekonomi daerah*. Yogyakarta : BPF E.
- Aziz, N. A. (2019). *Administrasi pembangunan, teori dan implementasi* . Jakarta: Salemba Humanika.
- Baltagi, B. H., (2008). *Econometric analysis of panel data (Vol. 4)*. Chichester: Wiley.
- Bappenas & UNDP. (2008). *Studi Evaluasi Pemekaran Wilayah 2001-2007*. Jakarta: BRIDGE (Building and Reinventing Decentralised Governance).
- BPS. (2023). *Papua dalam angka tahun 2023*. Papua: BPS Provinsi Papua.
- DJPK. (2021). *Buku alokasi tkdd tahun anggaran 2020*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- DJPK. (2022). *Buku alokasi tkdd tahun anggaran 2021*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- DJPK. (2023). *Buku alokasi tkdd tahun anggaran 2022*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25(9 Ed.)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C., (2006). *Basic econometrics: fifth edition*. New York: McGraw-Hill.
- Harrod, R., & Domar, E. (2008). *The solow growth model*. New Jersey: Princeton University Press
- Henry, N. (2015). *Public administration and public affairs*. Routledge.
- Katharina, R. (2019). *Menakar capaian otonomi khusus papua*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kuncoro, M. (2000). *Ekonomi pembangunan; teori, masalah dan kebijakan*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.

- Kuncoro, M. (2004). *Otonomi dan pembangunan daerah : reformasi perencanaan, perencanaan, strategi dan peluang*. Penerbit Erlangga.
- Leasiwal, T.C. (2022). *Teori-teori pertumbuhan ekonomi dan hubungannya dengan variabel makro ekonomi*. Solok: Mitra Cendekia Media.
- Makhfudz, M. (2013). *Hukum administrasi negara*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Marijan, K. (2006). *Decentralisation and cluster industry policy in indonesia*. Airlangga University Press.
- Muluk, Khairul. (2009). *Desentralisasi Pemerintah dan Daerah*. Malang: Bayumedia Publishing
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2017). *Metode penelitian kuantitatif*. Gava Media.
- Riggs, F. W., & Hakim, L. (1986). *Administrasi pembangunan: batas-batas, strategi pembangunan kebijakan dan pembaharuan administrasi*. Jakarta: Rajawali.
- Rosen, H. S., & Gayer, T. (2010). *Public finance. 9th edition*. New York: McGraw Hill.
- Saragih, J.P. (2003). *Desentralisasi fiskal dan keuangan daerah dalam otonomi*. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Siagian, S. P. (1978). *Manajemen*. Yogyakarta: Liberty.
- Sriyana, J. (2014). *Metode regresi data panel*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sukirno, S. (2001). *Pengantar teori makro ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Swasany, W.T. (2017). *Pemekaran daerah tinjauan sosial, politik dan ekonomi*. Depok: Rajawali Pers.
- Youw, A.P. (2007). *Pemekaran papua: pintu kesejahteraan bagi semua*. Ciputat: Wadi Press.

## **Jurnal**

- Adi, P. H. (2005). Dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi (studi pada kabupaten dan kota se Jawa-Bali). *Jurnal Interdisipliner Kritis UKSW*, 1–20.

- Anwar, A. R. D., Abdullah, M. F., & Hadi, S. (2018). Analisis pengaruh pendapatan asli daerah, dana otonomi khusus dan belanja modal terhadap pdrb di kab/kota provinsi papua. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(1), 1–13.
- Arina, M. M., Koleangan, R. A. M., & Engka, D. S. M. (2019). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi kota manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 20(01), 26–35.
- Barzelay, M. (1991). Managing local development: lessons from Spain. *Policy Sciences*, 24(3), 271-290.
- Boediono. (1985). Demand for money in Indonesia, 1975–1984. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 21(2), 74-94.
- Bohte, J., & Meier, K. J. (2000). The marble cake: Introducing federalism to the government growth equation. *Publius: The Journal of Federalism*, 30(3), 35-46.
- Brata, A. G. (2008). Pemekaran Daerah Di Papua: Kesejahteraan Masyarakat Vs Kepentingan Elit. *Simposium Nasional Riset Dan Kebijakan Ekonomi*, April, 1–9.
- Drechsler, W. (2018). Beyond the western paradigm: Confucian public administration. *Public Policy in the 'Asian Century' Concepts, Cases and Futures*, 19-40.
- Ibrahim, M., Adnan, A.A., and Alizah, N. (2020). Pengaruh Manajemen Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat Di Desa Bila Riase Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang. *Movere Journal*, 2(2):56–62.
- Indradewa, I. G. A., & Natha, K. S. (2015). Pengaruh inflasi, PDRB dan Upah Minimum terhadap penyerapan tenaga kerja di provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 4(8), 44563.
- Istania, R. (2021). How do ethnic groups compete for a new province in a decentralised Indonesia?. *Asian Journal of Political Science*, 29(3), 316–337.
- Kurniadi, B. D. (2012). Desentralisasi Asimetris di Indonesia. In Makalah disampaikan dalam Seminar di Lembaga Administrasi Negara (LAN) Jatinangor, (Vol. 26).
- Santoso, L. (2012). Problematika pemekaran daerah pasca reformasi di indonesia. *Jurnal Supremasi Hukum*, 1 (2). pp. 267-286. ISSN 2302-1128

- Manek, M., & Badrudin, R. (2017). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di provinsi nusa tenggara timur. *Telaah Bisnis*, 17(2), 81–98.
- Mawarni, A., Sari, D., & Abdullah, S. (2013). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah (studi pada kabupaten dan kota di aceh). *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Volume 2, (November 2019), 80–90.
- McGarry, J. (2007). Asymmetry in federations, federacies and unitary states. *Ethnopolitics*, 6(1), 105-116.
- Munandar, A. (2017). Analisis regresi data panel pada pertumbuhan ekonomi di negara-negara asia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 8(1), 59-67.
- Murniasih, E., Mulyadi, M. S. (2011). Pengaruh transfer pemerintah pusat terhadap perilaku fiskal pemerintah daerah di provinsi kalimantan timur. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia: Vol. 12: No. 1, Article 5*
- Negara, S. D., & Hutchinson, F. E. (2021). The impact of indonesia's decentralization reforms two decades on. *Journal of Southeast Asian Economies*, 38(3), 289–295.
- Nur'aeni, Y., & Suratno, S. (2015). Pengaruh PAD, DAU, DAK dan DOK terhadap Produk Domestik Regional Bruto. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 2(01), 32–42.
- Oates, W. (1993). Fiscal decentralization and economic development. *National Tax Journal*, XLVI. 237-243.
- Pangestika, S. (2015). Analisis estimasi model regresi data panel dengan pendekatan common effect model (CEM), fixed effect model (FEM), dan random effect model (REM). *Universitas Negeri Semarang*, 1-112.
- Prasojo, E. (2011). Jorjoran pemekaran daerah: instrumen kepentingan ekonomi politik. *Spirit Publik*, 1(7).
- Retnowati, N. (2011). Pemekaran daerah di indonesia. *Jurnal Ilmu Politik*, 2(1), 57–65.
- Rondinelli, D. A. (1981). Government decentralization in comparative perspective: theory and practice in developing countries. *International review of administrative sciences*, 47(2), 133-145.
- Rondinelli, D. A., Nellis, J. R., & Cheema, G. S. (1983). Decentralization in developing countries. *World Bank staff working paper*, 581, 13-28.

- Shah, A. (2007). A framework for evaluating alternate institutional arrangements for fiscal equalization transfers. In *Fiscal Equalization: Challenges in the Design of Intergovernmental Transfers* (pp. 141-162). Boston, MA: Springer US.
- Silaban, P. S., Sembiring, I.P., & Sitepu, V.A. (2020). Analisis Pengaruh PDRB dan Inflasi terhadap Pengangguran Terbuka di Sumatera Utara Periode 2003-2019. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 11(2), 127–132.
- Sima, M., Liang, P., & Qingjie, Z. (2023). The impact of fiscal decentralization on economic growth: A comparative analysis of selected African and OECD countries. *Heliyon*, 9(9), e19520.
- Somantri, L. (2008). Mengenal suku bangsa di pegunungan tengah papua. *Jurusan Pendidikan Geografi. FPIPS UPI*.
- Suaib, R. (2020). Urgensi pemekaran daerah di indonesia. *Jurnal Government of Archipelago (JGOA)*, 1(1), 34–44.
- Suaidy, H. (2017). Analisis pertumbuhan ekonomi wilayah kota sorong tahun 2013-2016. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(2), 81-89.
- Syarifuddin, Sarinah, (2022), konsep desentralisasi, dekonsentrasi dan otonomi daerah. *Center for Open Science*.
- Talangamin, O. B., Kindangen, P., & Koleangan, R. A. (2018). Pengaruh pendapatan asli daerah (pad), dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi di kota tomohon. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(7).
- Tarlton, C. D. (1965). Symmetry and asymmetry as elements of federalism: A theoretical speculation. *The Journal Of Politics*, 27(4), 861-874.
- Taufiq, A. B. (2010). Analisis Belanja Publik dan Penerapan Standard Costong Pada Manajemen Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) Suatu Kajian Alternatif Pendekatan Transfer Fiskal. (*Tesis Magister, Universitas Indonesia*)
- Tenrini, R.H., (2013). Pemekaran Daerah : Kebutuhan Atau Euforia Demokrasi? Menyibak Kegagalan Pemekaran. *Pusat Kebijakan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara*.
- Tiebout, C. M. (1956). A pure theory of local expenditures. *Journal of political economy*, 64(5), 416-424.
- White, S. (2011). Government decentralization in the 21st century. *Center for Strategic and International Studies*.

Widiprana, R. B. (2022). Analisis Pengaruh Dana Otonomi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua Barat. *Lensa Ekonomi*, 16(02), 200-213.

Zebua, B. H. N., & Tinov, M. T. (2017). Upaya Pemekaran Provinsi Kepulauan Nias (Studi Kepentingan Elite Politik). (*Doctoral dissertation, Riau University*).

## **Kebijakan**

Peraturan Gubernur Papua Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengalokasian Dana Otonomi Khusus Kabupaten/Kota se Provinsi Papua Tahun Anggaran 2018

Peraturan Gubernur Papua Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pengalokasian Dana Otonomi Khusus Kabupaten/Kota se Provinsi Papua Tahun Anggaran 2020

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah

PMK 211/PMK.07/2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas PMK 139/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Basil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Otonomi Khusus

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong

#### **Artikel Website**

bbc.com. (Oktober 27, 2023). Puluhan warga Yahukimo dilaporkan meninggal karena kelaparan, mengapa bencana ini terus berulang di Papua?. Diakses pada 1 Desember 2023, melalui <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cv207n5y9pdo>

POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A